

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. (Arsyad,1999:108)

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang mengarah kearah yang lebih baik dalam berbagai hal baik struktur ekonomi, sikap, mental, politik dan lain-lain. Dalam proses pembangunan di suatu daerah tentunya memiliki sudut pandang ekonomi pembangunan yang berbeda dan bisa dikatan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita (*income per capital*) yang berkelanjutan agar di suatu negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (Todaro dan Smith, 2011:16).

Masalah yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi daerah terletak pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang seringkali tidak sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan untuk menggunakan sumberdaya yang ada. Suatu daerah relatif memiliki potensi yang berbeda-beda dengan daerah lain yang dikarenakan adanya perbedaan karakteristik sumberdaya yang ada pada pada masing-masing daerah tersebut. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan tidak meratanya pembangunan antar

daerah pada masing-masing sektor. Ketimpangan ini dapat berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah, sehingga pembangunan daerah yang ada pada masing-masing daerah harus dilaksanakan sesuai dengan potensi dan karakteristik sumberdaya yang ada pada daerah tersebut.

Dalam pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah dan jenis-jenis peluang kerja untuk masyarakat di daerah tersebut. Tercapainya tujuan tersebut diharapkan pemerintah daerah dan masyarakatnya agar bersama-sama mengambil inisiatif untuk membangun daerahnya. Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada berupaya menginventarisir potensi sumberdaya yang ada agar merancang dan membangun perekonomian daerah. Perbedaan di suatu daerah dapat membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang ditetapkan dan berhasil pada suatu daerah yang belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain. Apabila akan membangun suatu daerah, maka kebijakan yang perlu diambil harus sesuai dengan kondisi masalah, kebutuhan dan potensi di daerah tersebut. Oleh karenanya, penelitian yang mendalam tentang keadaan di setiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang diteliti. (Arsyad, 1999:108).

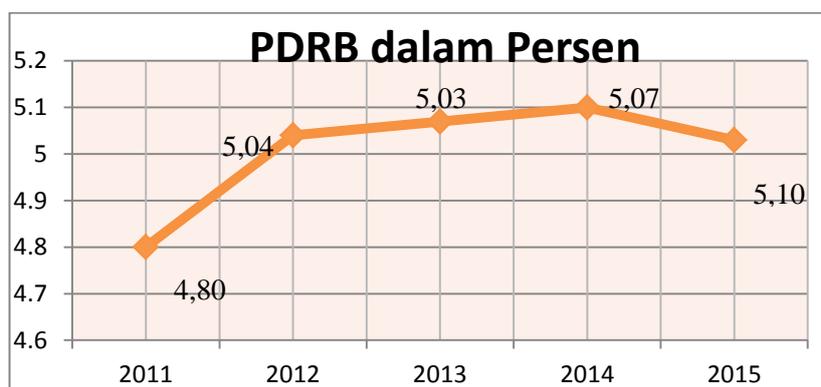
Hal tersebut kemudian didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan

desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dimaksudkan dari tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Disamping itu konsekuensi diberlakukan peraturan ini adalah adanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan kepada pemerintah daerah yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yang di maksud dengan kewenangan adalah perlimpahan tanggungjawab yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, serta moneter dan fiskal. Kewenangan pembiayaannya, yaitu daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber potensi ekonomi, serta sumber daya alamnya tanpa ada intervensi terlalu jauh dari pemerintah pusat. Hal ini akan mempengaruhi perekonomian daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada terciptanya peningkatan pembangunan daerah (Fachrurrazy, 2009).

Dengan adanya prinsip desentralisasi dan otonomi daerah tersebut, salah satu provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di Kabupaten Kupang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan membina sendiri pembangunan wilayahnya. Keberhasilan pembangunan tersebut kemudian dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi wilayah yang diperoleh dari kenaikan output agregat (barang dan jasa) yang dinyatakan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kupang dari tahun 2011 hingga 2015 yang disajikan dalam analisis dalam persen dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan adanya prospek kinerja yang membanggakan dari pemerintah dan juga kerjasama masyarakat sehingga berkontribusi meningkatkan perekonomian dan kontribusi berbagai sektor unggulan yang memiliki daya saing tinggi secara nasional serta mampu meningkatkan PDRB kabupaten Kupang.



GAMBAR 1.1

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2011 – 2015

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kupang setiap tahun mengalami peningkatan sejak tahun 2011 hingga 2015. Hal ini terbukti sejak tahun 2011 pertumbuhan PDRB sebesar 4,80 persen, sumbangsih yang tertinggi oleh Pengadaan listrik dan gas dengan pertumbuhan sebesar 30,93 persen dan diikuti oleh lapangan usaha dalam bidang Kontruksi sebesar 9,92 persen. Kabupaten Kupang sedang giat dalam pembangunan dalam pengadaan listrik dan gas. Kemudian tahun 2012 prospek PDRB Kabupaten Kupang mengalami peningkatan yang cukup memuaskan pemerintah daerah yaitu sebesar 5,04 persen, hal ini sangat membanggakan dimana kontribusi PDRB tertinggi disumbangkan oleh lapangan usaha bidang jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,84 persen dimana

pemerintah selalui berusaha menggenjot bidang usaha dalam keuangan mikro serta mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan memanfaatkan keuangan untuk pembangunan daerah. Sumbangsih kedua oleh Penyediaan akomodasi dan makan minum berhubung Kabupaten Kupang masih kurang dalam pengadaan akomodasi dan makan minum belum memadai jadi pemerintah sangat memperhatikan hal ini alhasil mengalami peningkatan sebesar 8,77 persen dibandingkan tahun 2011 sangat kecil hanya sebesar 1,69 persen. Pada tahun 2013 PDRB kembali mengalami peningkatan pertumbuhan 0,03 persen dari tahun sebelumnya menjadi 5,07 persen dengan sumbangsih terbesar masih dipegang oleh lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum, prospek pertumbuhan lapangan usaha yang lainnya rata-rata mengalami peningkatan juga. Kabupaten Kupang melakukan pembangunan tidak monoton pada satu sektor saja tiap tahunnya sektor yang lain juga ikut diperhatikan termasuk lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebagai moda transportasi di kabupaten Kupang yang menyumbang pertumbuhan PDRB sebesar 8,85 persen. *Real estate* memberikan sumbangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Kupang sebesar 8,48 persen pada tahun 2014 dimana pemerintah sedang berusaha menyediakan perumahan dan berbagai fasilitas lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga dengan usaha-usaha tersebut pemerintah Kabupaten Kupang kembali membuahakan hasil sehingga PDRB tetap meningkat setiap tahunnya. Tetapi pada tahun 2015 PDRB mengalami penurunan yang tidak begitu fluktuatif mencapai angka 5,03 persen dari tahun 2014 sebesar 5,10 pesen. Jasa perusahaan memberikan kontribusi yang tertinggi pada tahun 2015 sebesar 13,43

persen dengan lapangan usaha yang paling terendah adalah Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,86 persen dan jasa lainnya hanya 2,16 persen. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sangat konsisten untuk membangun perekonomian daerahnya. Tidak hanya itu pemerintah melakukan hal konkret guna mensejahterakan dan membuka peluang para entrepreneur dan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran walaupun belum secara signifikan dapat mengurangi pengangguran. Kabupaten Kupang sangat berpotensi untuk dikembangkan dan masih banyak pekerjaan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah baik dalam pengembangan pariwisata, perumahan rakyat, listrik dan gas, konstruksi serta sektor lapangan usaha lainnya guna mensejahterakan rakyat dan demi kemajuan perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap sektor unggulan pada Kabupaten Kupang, hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penentu Sektor Unggulan di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur-Indonesia: 2011-2015”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup pembangunan ekonomi daerah sangat luas maka penulis membatasi pembahasan masalah pada sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Kupang dan data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

C. Rumusan Masalah

1. Sektor ekonomi apakah yang memiliki potensi sebagai sektor unggulan (*sector basic*) serta memiliki keunggulan yang kompetitif atau memiliki daya saing serta spesialis dengan bantuan alat analisis *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share*, *Model Rasio Pertumbuhan (MRP)* ?
2. Sektor ekonomi apakah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengembangan pembangunan dengan memanfaatkan alat analisis *Klassen Typology* ?
3. Bagaimana strategi pengembangan sektor unggulan dan non unggulan untuk pembangunan wilayah dengan bantuan analisis SWOT ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sector apa saja yang menjadi sektor unggulan dan memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing dan spesialisasi dengan menggunakan alat bantu analisis *Location Quotient (LQ)* dan *Shift Share*.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan sektor-sektor ekonomi berdasarkan kondisi PDRB di Kabupaten Kupang menggunakan analisis *Model Rasio Pertumbuhan (MRP)*.
3. Untuk mengetahui strategi pengembangan sector unggulan dan non unggulan untuk pembangunan wilayah dengan memanfaatkan bantuan analisis *Typology Klassen*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

- a. Sebagai proses pembelajaran dan penambah wawasan ilmiah bagi penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.
- b. Mengembangkan wawasan ilmiah yang ditekuni penulis dan sebagai media untuk menerapkan wawasan dan ilmu yang pernah didapatkan selama menjalani studi pada fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. Penelitian ini juga manfaatnya sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan serta masukan bagi kalangan akademisi dan peneliti yang tertarik untuk membahas mengenai topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi dan bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil dan menindaklanjuti kebijakan ekonomi yang tepat guna menjaga kestabilan perekonomian nasional.
- b. Sebagai referensi bagi masyarakat secara umum dalam menyikapi fenomena ekonomi yang terjadi di kehidupan sehari-hari.